

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Akuntansi merupakan disiplin ilmu yang menyediakan informasi untuk keperluan suatu perusahaan, lembaga, atau entitas lain. Informasi ini dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban entitas. Ditinjau dari segi aktivitasnya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai seni mencatat, mengelompokkan, melaporkan, dan menganalisis data keuangan suatu perusahaan/entitas.

Akuntansi berfungsi pada segi pengelolaan keuangan suatu entitas, baik entitas yang bertujuan mencari laba ataupun nonlaba. Walaupun entitas nonlaba tidak berorientasi untuk mendapatkan laba, akan tetapi masih berhubungan dengan permasalahan keuangan seperti anggaran, gaji karyawan, biaya rekening listrik dan telepon, serta urusan keuangan yang lain. Entitas nonlaba mendapat sumberdaya dari para penyumbang atau donatur yang tidak menginginkan keuntungan ataupun timbal balik yang sama dengan jumlah sumberdaya yang disumbangkan. Sebagai sarana pertanggungjawaban maka laporan keuangan entitas nonlaba perlu dilaporkan secara akuntabel.

Laporan keuangan maka suatu entitas nonlaba telah menerapkan prinsip keterbukaan agar tidak menimbulkan kecurigaan atau kekhawatiran antara pengelola entitas dengan masyarakat. Dengan begitu fungsi akuntansi menjadi sangat penting karena telah menyajikan informasi keuangan secara transparan.

Laporan keuangan adalah hasil dari segala proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau kegiatan perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. (Herry 2016).

Indonesia telah memutuskan untuk berkiblat pada *International Financial Reporting Standar* (IFRS) sebagai panduan dalam menyusun laporan keuangan, hal ini dilakukan agar Indonesia mendapatkan pengakuan yang maksimal dalam rangka meningkatkan kredibilitas pasar modal di mata Investor global, pelebaran pasar investasi, dan peningkatan efisiensi alokasi modal. Hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan di pasar modal internasional. Adanya proses konvergensi dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ke IFRS ini menyebabkan SAK berbasis industri dicabut karena telah diatur pada SAK lainnya.

Salah satu SAK yang dicabut adalah PSAK 45 yang mengatur mengenai penyajian laporan keuangan entitas nirlaba, yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 23 Desember 1997. Alasan pencabutan PSAK 45 dilakukan karena penyusunan laporan keuangan sudah diatur pada PSAK 1 yang esensinya sama. Jika terdapat 2 pernyataan yang sama, tentunya akan menyebabkan inkonsistensi serta ketidakjelasan dalam ruang lingkupnya. Ruang lingkup PSAK 45 mengatur mengenai penyajian laporan keuangan entitas nirlaba, keuangan untuk entitas laba, padahal dalam PSAK 1 juga memberikan peluang bagi entitas berorientasi nonlaba.

Setelah melalui pertimbangan, DSAK IAI menetapkan beberapa Draf Eksposur, diantaranya :

1. DE Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan;
2. DE ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba;
3. DE PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

Draf Eksposur tersebut sudah melalui tanggapan pendapat publik di Grha Akuntan pada tanggal 31 Oktober 2018. Kemudian DSAK IAI mengesahkan PPSAK No. 13 pada tanggal 11 April 2019 dengan arti bahwa PSAK 45 resmi dicabut dan tidak boleh diterapkan lagi bagi entitas yang berorientasi nirlaba. Oleh sebab itu, maka DSAK IAI menetapkan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba sebagai pengganti dari PSAK 45 yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Organisasi entitas nonlaba yang harus berpedoman pada ISAK 35 yakni organisasi pemerintahan, organisasi pendidikan, organisasi kesehatan, organisasi keagamaan, dan lain-lain. Salah satu contoh organisasi keagamaan yang berorientasi nonlaba, yang menjadi tempat beribadah bagi umat muslim adalah sedangkan ruang lingkup PSAK 1 dipahami seolah-olah hanya mengatur mengenai penyusunan laporan mesjid. Mesjid juga dijadikan sebagai tempat mempelajari alqur'an, kajian keislaman, pengajian, memperingati hari besar Islam, dan lainnya (Janis & Budiarmo, 2017).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan penganut agama Islam di Indonesia diperkirakan tercatat sebanyak 229,6 juta jiwa atau sekitar 87% dari seluruh penduduk di Indonesia. Data ini diperoleh dari data *Global Religious Futures*. Hal ini menunjukkan bahwa populasi penduduk muslim terbanyak di dunia

ada di Negara Indonesia, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai *Islamic Center of Gravity* yang mempengaruhi Indonesia dalam potret wajah Islam di dunia. Bambang Soesatyo juga memprediksi bahwa Islam merupakan agama terbesar di dunia yang diperkirakan mencapai 2.8 milyar jiwa. Menurut Kepala Badan Bela Negara FKKPI hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki pengaruh besar terhadap Islam di dunia, dengan banyaknya masyarakat muslim di Indonesia dan berkembangnya agama Islam, menyebabkan bertambahnya tempat ibadah yang tersebar. Saat ini, total mesjid dan mushalla di Indonesia tercatat sekitar 741.991, data ini dikumpulkan secara manual dan berjenjang dari data Kantor Urusan Agama tiap daerah. Saat ini jumlah mesjid dan mushalla yang tercatat dalam situs website resmi Sistem Informasi Mesjid (SIMAS) sebanyak 663.900 yang terdiri dari beberapa tipologi.

Tabel 1.1
Data Mesjid dan Mushalla di Indonesia

No	Mesjid	Jumlah
1	Mesjid Negara	1
2	Mesjid Raya	34
3	Mesjid Agung	437
4	Mesjid Besar	5,100
5	Mesjid Jami	242,520
6	Mesjid Bersejarah	1,051
7	Mesjid di Tempat Umum	50,549

No	Mushlla	Jumlah
1	Mushalla di Tempat umum	90,852
2	Mushalla Perkantoran	3,885
3	Mushalla Pendidikan	14,524
4	Mushalla Perumahan	254,947

Sumber : Data SIMAS Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023

Dewan Masjid Indonesia (DMI) menjelaskan bahwa mesjid memiliki tiga macam fungsi utama. Pertama, sebagai ibadah (Mahdlah) dan tempat ibadah secara meluas (Ghairu Mahdlah) selama dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Kedua, sebagai pembinaan masyarakat. Ketiga, sebagai pusat komunikasi untuk mempersatukan umat Islam. Organisasi keagamaan seperti mesjid dikelola oleh sejumlah masyarakat yang telah dipercaya yang disebut dengan *ta'mir*. Dalam hal ini *ta'mir* bertugas dalam segala kegiatan operasional yang ada disuatu mesjid. Tentunya *ta'mir* mesjid juga memiliki struktur kepengurusan seperti ketua *ta'mir*, sekretaris, bendahara, dan beberapa divisi yang ada. Salah satu tugas pokok yang dilakukan adalah menyusun laporan keuangan, dimana dana yang diterima mesjid berasal dari masyarakat, baik itu infaq, sedekah, kotak amal, atau yang lainnya.

Dalam hal penyusunan laporan keuangan ini merupakan tugas yang di amanahkan kepada bendahara mesjid. Bendahara diharapkan mampu menyusun laporan keuangan mesjid secara detail dan runtut sesuai dengan SAK yang berlaku bagi entitas nonlaba yaitu ISAK 35.

Beberapa mesjid belum menyajikan laporan keuangan sesuai SAK yang berlaku termasuk masjid besar Syu'latul Iman belum menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Padahal hal ini memiliki pengaruh untuk keterbukaan kepada masyarakat yang ingin mengetahui apakah dana keuangan di mesjid tersebut mampu dikelola dan digunakan untuk kepentingan operasional mesjid. Oleh sebab itu, sebagai salah satu entitas nonlaba harus melakukan keterbukaan informasi kepada publik untuk mempertanggungjawabkan informasi keuangannya secara transparan karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Salah satu

pertanggungjawabannya yaitu dibutuhkan rincian dana, apakah telah disalurkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Dengan pertanggungjawaban tersebut, tentunya akan menambah kepercayaan dan mengurangi adanya kesenjangan informasi dalam masyarakat sebagai pemberi sumber dana.

Tabel 1.2
Data Mesjid Di Kabupaten Tasikmalaya

No	Mesjid	Jumlah
1	Mesjid Agung	1
2	Mesjid Besar	39
3	Mesjid Jami	4.234
4	Mesjid Bersejarah	2
5	Mesjid di Tempat Publik	200

Sumber : SIMAS Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti dari SIMAS, mesjid besar Syu'latul Iman termasuk salah satu mesjid dengan tipologi mesjid besar yang ada di kabupaten Tasikmalaya yang ada di Jl. Zenal Asikin No.49, Kec. Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46156, kemudian mesjid besar Syu'latul Iman juga memiliki struktur kepengurusan dan pengelolaan segala kegiatan yang tersistematis dengan baik, adanya piagam dari Kementerian Agama, jadwal Imam dan khotib sholat Jumat, serta laporan keuangan pemasukan dan pengeluaran.

Berdasarkan pemaparan permasalahan pada latar belakang, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian di mesjid besar Syu'latul dengan judul **“PENERAPAN ISAK 35 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NONLABA (STUDI KASUS PADA MESJID BESAR SYU’LATUL IMAN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyajian laporan keuangan pada Mesjid Besar Syu'latul Iman?
2. Apakah penyajian laporan keuangan pada Mesjid Besar Syu'latul Iman sesuai dengan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba?
3. Apa saja problematika yang dihadapi Masjid Besar Syu'latul Iman dalam penyajian laporan keuangannya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menjadi orientasi yang mengarahkan peneliti agar penelitian berlangsung secara terstruktur dan tidak melampaui batas permasalahan yang sudah ditentukan sebelumnya. Tujuan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisa proses penyajian laporan keuangan pada Mesjid Besar Syu'latul Iman.
2. Mengetahui dan menganalisa kesesuaian penyajian laporan keuangan pada Mesjid Besar Syu'latul Iman dengan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba.
3. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi Mesjid Besar Syu'latul Iman dalam menyajikan laporan keuangannya, serta memberikan tambahan pengetahuan bagi penyusun laporan keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Bagian ini berisi mengenai kegunaan seperti apa yang dapat diterapkan pasca penelitian. Manfaat yang diberikan dapat berupa manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Diharapkan dapat mendukung teori dan wawasan pengetahuan mengenai penyusunan laporan keuangan dalam tata kelola keuangan mesjid berdasarkan SAK yang berlaku yakni ISAK 35. Serta mampu dijadikan referensi atau rujukan oleh peneliti yang lain.

2. Aspek Praktis (Terapan)

- a. Bagi Peneliti Diharapkan mampu memberi wawasan serta pelatihan dalam melakukan penyajian laporan keuangan mesjid berdasarkan ISAK 35 di mesjid besar Syu'latul Iman.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan kepustakaan yang berkaitan dengan SAK, serta menambah koleksi literatur atau referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Bagi Mesjid Besar Syu'latul Iman Diharapkan mampu memberikan referensi dan acuan dalam menyusun laporan keuangan mesjid yang lebih sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ISAK 35.
- d. Bagi Masyarakat Diharapkan dapat menambah kepercayaan masyarakat pada pengurus ta'mir dalam mengelola keuangan mesjid secara transparan dan akuntabel.